

**EVALUASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG SERTIFIKASI GURU
DALAM MENINGKATKAN KINERJA GURU**

(Studi Kasus SMA Negeri 1 Sidikalang Kabupaten Dairi)

SRKIPSI

OLEH:

KEVIN HAGAI SINAMBELA

198520118



PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/5/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositorv.uma.ac.id)27/5/24

**EVALUASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG SERTIFIKASI GURU
DALAM MENINGKATKAN KINERJA GURU**

(Studi Kasus SMA Negeri 1 Sidikalang Kabupaten Dairi)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Medan Area

Oleh:

KEVIN HAGAI SINAMBELA

198520118

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/5/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositorv.uma.ac.id)27/5/24

LEMBAR PENGESAHAN

Judul skripsi : Evaluasi Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 11 Tahun 2011
Tentang Sertifikasi Guru Dalam Meningkatkan Kinerja Guru
(Studi Kasus SMA Negeri 1 Sidikalang Kabupaten Dairi)


Nama : Kevin Hagai Sinambela

NPM : 198520118

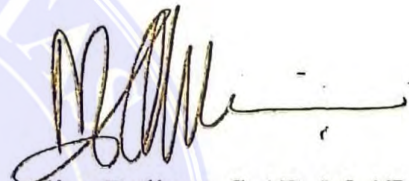
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing:



Dr. Drs. Indra Muda, M.AP
Pembimbing 1



Marlina Deliana, S.AB. M.AB
Pembimbing 2

Mengetahui:



Dr. Wahid Musthafa, S. S.Sos, M.IP
Dekan



Dr. Drs. Indra Muda, M.AP
Ketua Administrasi Publik

Tanggal Lulus : 05 April 2024

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Kevin Hagai Sinambela

NPM : 198520118

Program studi : Administrasi Publik

Judul Skripsi : Evaluasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Meningkatkan Kinerja Guru (Studi Kasus SMA Negeri 1 Sidikalang Kabupaten Dairi)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini dibuat dengan dengan hasil karya sendiri. Sejauh pengetahuan saya tidak terdapat hasil karya atau pendapat orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Medan, 5 April 2024



Kevin Hagai Sinambela
198520118

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademik Universitas Medan Area, Saya yang Bertanda Tangan
Dibawah ini:

Nama : Kevin Hagai Sinambela

NPM : 198520118

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Evaluasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Meningkatkan Kinerja Guru (Studi Kasus SMA Negeri 1 Sidikalang Kabupaten Dairi)" beserta perangkat yang ada (Jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 5 April 2024



Kevin Hagai Sinambela
198520118

ABSTRAK

Sertifikasi merupakan proses pemberian sertifikat pendidik untuk Guru dan dosen. Hal ini dikemukakan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 11 Tahun 2011 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan. Upaya pemerintah untuk menjamin mutu Guru agar tetap memenuhi standar kompetensi, diperlukan adanya suatu mekanisme yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Evaluasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Meningkatkan Kinerja Guru dengan menggunakan teori William N Dunn yang memiliki 6 indikator dalam evaluasi yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, Ketepatan. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Evaluasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Meningkatkan Kinerja Guru di SMA Negeri 1 Sidikalang dapat dikatakan sudah terealisasi dengan baik namun kurang merata. Perekrutan penerima sertifikasi guru di SMAN 1 Sidikalang tidak merata dikarenakan lebih mendahulukan guru yang lebih tua. Namun indikator yang lain sudah berjalan lebih baik sesuai dengan peraturan yang diberlakukan.

Kata Kunci: Peraturan Menteri Pendidikan, Sertifikasi Guru, Kabupaten Dairi

ABSTRACT

Certification is the process of providing teaching certificates for teachers and lecturers. This is stated in the Regulation of the Minister of National Education (Permendiknas) Number 11 of 2011 and Law of the Republic of Indonesia Number 14 of 2005 on Teacher Certification in Position. The government's effort to ensure that the quality of teachers continues to meet competency standards requires an adequate mechanism. This study aims to determine the Evaluation of the Minister of National Education Regulation Number 11 of 2011 concerning Teacher Certification in Improving Teacher Performance using William N Dunn's theory which has 6 indicators in the evaluation, namely Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness, Accuracy. The method used in this research is descriptive qualitative method with data collection techniques of observation, interview and documentation. The results showed that the Evaluation of the Regulation of the Minister of National Education Number 11 of 2011 concerning Teacher Certification in Improving Teacher Performance at SMA Negeri 1 Sidikalang can be said to have been well realised but less equitable. The recruitment of teacher certification recipients at SMAN 1 Sidikalang is uneven because it prioritises older teachers. However, other indicators have run better in accordance with the regulations in force.

Keywords: *Minister of Education Regulation, Teacher Certification, Dairi Regency*



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama Lengkap : Kevin Hagai Sinambela

Lahir : Sidikalang, 29 Mei 2001

Kelamin : Laki-laki

Agama : Kristen Protestan

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jalan Taud Gg. Dolok Hole

Status : Belum Menikah

Email : kevinsinambela87@gmail.com

No. Handphone : 081265731449

Latar Belakang Pendidikan

2007 - 2013 : SD Negeri 030288 Sidikalang

2013 - 2016 : SMP Negeri 3 Sidikalang

2016 - 2019 : SMA Negeri 1 Sidikalang

2019 - sekarang : S1 Administrasi Publik di Universitas Medan Area

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, atas berkat dan anugerahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan setiap tahapan dari skripsi yang berjudul “Evaluasi Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Meningkatkan Kinerja Guru (Studi Kasus SMA Negeri 1 Sidikalang Kabupaten Dairi)”.

Skripsi ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban tertulis yang penulis lakukan untuk menempuh ujian akhir guna menyelesaikan program studi sarjana (S1) di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Medan Area.

Dalam rangka menyusun skripsi ini, penulis telah melalui perjalanan yang cukup panjang. Banyak hambatan yang telah dihadapi dalam penyusunannya, namun berkat kehendak Tuhan yang Maha Esa, dan juga bantuan, bimbingan, serta arahan dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. Walid Musthafa, S.Sos, M.IP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area
3. Bapak Drs. Indra Muda , M.AP selaku ketua Program Studi Administrasi Publik
4. Bapak Drs. Indra Muda M. AP selaku dosen pembimbing I yang sudah berkenan untuk meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan serta motivasi sejak awal penyusunan proposal hingga selesainya skripsi ini

5. Ibu Marlina Deliana, S.AB, M.AB, selaku dosen pembimbing II yang sudah berkenan untuk meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan dan motivasi sejak awal penyusunan hingga selesainya skripsi ini
6. Ibu Chairika Nasution, S.AP, M.AP selaku sekretaris skripsi saya yang sudah berkenan meluangkan waktu dalam seminar proposal, seminar hasil dan sidang skripsi
7. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area yang sudah berkenan memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan
8. Segenap Tenaga Kependidikan Universitas Medan Area yang berkenan memberikan bantuan kepada penulis
9. Kedua Orangtua penulis Bapak C. Sinambela dan Ibu D. Sihombing yang paling berpengaruh dalam perjalanan penulis, yang selalu mendukung penulis dalam keadaan apapun, baik dalam dukungan moral maupun materi
10. Rekan-rekan seperjuangan stambuk 2019 Prodi Administrasi Publik, yang telah berjuang bersama penulis dan memberi banyak pelajaran serta pengalaman berharga selama di Universitas Medan Area
11. Bapak Drs. Silas Sahat Sihombing selaku Kepala SMA Negeri 1 Sidikalang Kabupaten Dairi yang sudah memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian
12. Bapak Jonny Suhardo Siregar, S.Pd dan Bapak Prima Capah, S.Pd selaku guru SMA Negeri 1 Sidikalang Kabupaten Dairi yang telah bersedia menjadi sumber data dari penelitian ini

13. Anggreini Riana Pasaribu yang senantiasa menemani penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini

14. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang sudah membantu serta memberi dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis buat ini memiliki banyak kekurangan sehingga masih jauh dari kata sempurna, hal ini karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis meminta maaf jika ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini dan penulis juga berharap pembaca dapat memberi kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Semoga dengan adanya pembuatan skripsi ini dapat memberikan manfaat berupa ilmu maupun pengetahuan bagi para pembaca. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Medan, November 2023

Kevin Hagai Sinambela

DAFTAR ISI

	Hal
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II _Toc162012631 TINJUAN PUSTAKA	11
2.1 Evaluasi.....	11
2.2 Teori Evaluasi	13
2.3 Pendidikan.....	14
2.4 Sertifikasi Guru.....	19
2.5 Penelitian Terdahulu	21
2.6 Kerangka Berpikir.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1. Jenis Penelitian.....	25
3.2. Lokasi Dan Waktu Penelitian	27
3.3 Informan Penelitian.....	28

3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.5 Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1 Hasil Penelitian	33
4.1.1 Profil Sekolah SMAN 1 Sidikalang.....	33
4.1.2 Visi dan Misi SMAN 1 Sidikalang.....	34
4.1.3 Struktur Organisasi SMAN 1 Sidikalang.....	35
4.1.4 Sarana dan Prasarana SMA Negeri 1 Sidikalang.....	36
4.1.5 Jumlah Siswa SMAN 1 Sidikalang.....	37
4.2 Pembahasan Penelitian.....	37
4.2.1 Evaluasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Di SMA Negeri 1 Sidikalang	37
4.2.2 Faktor Penghambat Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang sertifikasi guru dalam meningkatkan kinerja guru di SMA Negeri 1 Sidikalang	61
BAB V PENUTUP.....	63
5.1 Kesimpulan	63
5.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kriteria Evaluasi menurut Dunn	13
Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu.....	21
Tabel 3. 1 Waktu Pelaksanaan.....	28
Tabel 3. 2 Informan Penelitian	29



DAFTAR BAGAN

Bagan 1. 1 Kerangka Pemikiran.....	24
Bagan 4. 1 Struktur Organisasi	36



DAFTAR LAMPIRAN

A. PEDOMAN WAWANCARA.....	68
B. SURAT IZIN PENELITIAN.....	70
C. DOKUMENTASI PENELITIAN	71



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan meliputi pengajaran keahlian khusus, dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat. Pendidikan merupakan suatu pembekalan yang harus dimiliki oleh setiap manusia baik secara teori maupun secara praktik. Pendidikan diperlukan untuk dapat mengetahui, memahami, mencoba, menerapkan, juga melakukan setiap kegiatan sesuai aturan.

Sistem pendidikan di Indonesia mencakup tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Pendidikan dasar terdiri dari sekolah dasar (SD) selama 6 tahun dan sekolah menengah pertama (SMP) selama 3 tahun. Pendidikan menengah terdiri dari sekolah menengah atas (SMA) atau sekolah menengah kejuruan (SMK) selama 3 tahun. Pendidikan tinggi mencakup perguruan tinggi dan universitas. Pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, kurikulum nasional diterapkan yang mencakup berbagai mata pelajaran, seperti matematika, ilmu pengetahuan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan sejarah. Selain itu, ada juga pelajaran agama yang disesuaikan dengan keyakinan agama masing-masing siswa. Sekolah-sekolah di Indonesia berada di bawah yurisdiksi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Di tingkat pendidikan tinggi, terdapat perguruan tinggi negeri dan swasta yang menawarkan berbagai program studi dalam berbagai disiplin ilmu. Universitas yang terkemuka biasanya memiliki reputasi yang baik dan menarik mahasiswa dari seluruh Indonesia. Pendidikan tinggi di Indonesia dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Sertifikasi merupakan proses pemberian sertifikat pendidik untuk Guru dan dosen. Hal ini dikemukakan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 11 Tahun 2011 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan. Upaya pemerintah untuk menjamin mutu Guru agar tetap memenuhi standar kompetensi, diperlukan adanya suatu mekanisme yang memadai. Penjaminan mutu Guru ini perlu dikembangkan berdasarkan pengkajian yang komprehensif untuk menghasilkan landasan konseptual dan empirik, melalui sistem sertifikasi. Setiap guru yang ada di Indonesia tentu saja mempunyai keinginan dan juga diwajibkan untuk mengikuti kegiatan sertifikasi guru, sehingga dengan hal itu guru dapat menjadi profesional dan diakui oleh masyarakat Indonesia. Proses sertifikasi terhadap sebuah profesi menjadi hal yang sangat sangat penting misalnya saja sertifikasi guru, karena hal ini dapat memastikan pemilik profesi mempunyai kompetensi yang mendukung. Berdasarkan pada peraturan yang berlaku, proses sertifikasi guru mempunyai prosedur dan jenis-jenis yang berbeda. Dilihat dari segi jenisnya proses sertifikasi ini terbagi menjadi tiga pola yaitu sebagai berikut:

1. Pola PSPL

Jenis atau pola yang pertama ditujukan untuk guru yaitu Pemberian Sertifikasi Pendidik Secara Langsung (PSPL). Melalui pola ini maka proses sertifikasi dimulai dengan pemeriksaan berkas terlebih dahulu. Selanjutnya baru masuk ke tahap uji kompetensi dan disusul dengan hasil pengumuman uji kompetensi tersebut. Terdapat beberapa kriteria atau persyaratan khusus untuk guru di Indonesia supaya dapat mengikuti pola satu ini. Diantaranya yaitu sebagai berikut: Guru yang telah mempunyai kualifikasi akademik S2 atau S3 yang berasal dari perguruan tinggi yang terakreditasi di dalam bidang pendidikan atau bidang studi yang bersangkutan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran.

Mata pelajaran yang telah diajarkan oleh guru dengan golongan paling rendah IVb atau yang telah memenuhi angka kredit kumulatif yang setara dengan golongan IVb. Guru kelas yang telah mempunyai kualitas akademik S2 atau S3 berasal dari perguruan tinggi yang terakreditasi di dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang bersangkutan dengan tugas yang telah diampunya dengan golongan paling rendah IVb. Ataupun guru yang telah memenuhi angka kredit kumulatif yang selevel atau setara dengan golongan IVb.

Guru bimbingan dan konseling (BK) atau konselor yang telah mempunyai kualifikasi akademik S2 atau S3 berasal dari perguruan tinggi terakreditasi di dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang bersangkutan dengan tugas dari bimbingan dan konseling. Mempunyai golongan paling rendah IVb atau yang telah mempunyai angka kredit kumulatif setara dengan golongan IVb.

Guru yang diangkat pada jabatan pengawas di satuan pendidikan yang telah memiliki kualifikasi akademik S2 atau S3 yang berasal dari perguruan tinggi

terakreditasi di dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang bersangkutan dengan tugas kepengawasan. Mempunyai golongan paling rendah IVb atau yang telah memenuhi angka kredit kumulatif yang setara dengan golongan Ivb. Guru yang sudah mempunyai golongan paling rendah IVc atau yang sudah memenuhi angka kredit kumulatif yang setara dengan golongan IVc (melewati inpassing)

2. Pola PF

Pola atau jenis yang kedua yaitu jenis Pola Portofolio (PF), sesuai dengan namanya pada jenis ini memang melakukan penilaian berdasarkan dari portofolio guru yang bersangkutan. Portofolio sendiri dapat diartikan sebagai daftar pengalaman guru di dalam dunia pendidikan yang kemudian dapat dibuktikan. Sehingga pola PF ini sangat cocok untuk diikuti oleh para guru yang telah mempunyai pengalaman panjang. Terdapat beberapa poin yang dinilai dalam pola portofolio guru yang telah dikirimkan kepada pihak penyelenggara sertifikasi. Adapun poin penilaian yang dimaksud antara lain yaitu: Pengalaman dalam mengajar, karya pengembangan profesi, penghargaan yang bersangkutan dengan bidang pendidikan, pendidikan dan pelatihan atau diklat prestasi akademik, keikutsertaan dalam forum ilmiah, menilai dari atasan dan pengawas, pengalaman organisasi pada bidang kependidikan dan sosial, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, kualifikasi akademik

Guru yang dapat mengikuti sertifikasi dengan pol aini yaitu guru yang diangkat di dalam jabatan pengawas pada satuan pendidikan yang telah terpenuhi syarat akademik dan administrasi serta mempunyai prestasi dan persiapan diri. Jika guru

tidak mempunyai persiapan diri, maka tetap memperoleh izin untuk ikut di dalam sertifikasi pola PLPG jika telah lulus dalam Uji Kompetensi Awal (UKA). Sehingga tidak perlu untuk memakai pola PF jika kesulitan untuk memenuhi persyaratannya.

3. Pola PLPG

Jenis sertifikasi guru yang terakhir yaitu pola Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), PLPG sendiri merupakan jenis sertifikasi dalam bentuk pelatihan yang penyelenggarannya dilakukan oleh Rayon LPTK untuk memfasilitasi terpenuhinya standar kompetensi guru. Jenis PLPG ini pada dasarnya berbentuk pelatihan yang sekaligus merupakan bentuk ujian, jadi para guru yang telah memiliki status sebagai peserta akan aktif mengajar di kelas yang telah ditentukan. Ketentuannya yaitu memenuhi beban belajar sebanyak 90 jam pembelajaran selama 10 hari.

Pelatihan tersebut dilakukan dalam bentuk pelatihan dan workshop dengan menggunakan pendekatan pembelajaran yang inovatif, kreatif, aktif, efektif dan menyenangkan (PAIKEM). Pada tahap akhir dari uji kompetensi jenis PLPG ini, setiap guru peserta akan melaksanakan uji kompetensi secara tertulis. Saat ini uji kompetensi telah berbasis komputer, akan tetapi disesuaikan dengan kemampuan dari pihak penyelenggara. Guru yang dapat mengikuti jenis sertifikasi ini yaitu guru yang bertugas sebagai guru mata pelajaran, guru kelas, guru bimbingan dan konseling, dan juga guru yang telah diangkat di dalam jabatan pengawas pada satuan pendidikan yang memilih sertifikasi jenis PLPG.

SMAN 1 Sidikalang, sekolah SMA Negeri 1 Sidikalang telah mengikuti program sertifikasi guru tersebut melalui dinas Pendidikan menawarkan kepada guru-guru yang telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai guru yang telah sertifikasi. Para Guru sangat antusias untuk mengikuti kegiatan seleksi ini, bahkan para Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah pun ramai-ramai ikut mendaftarkan diri sebagai calon peserta. Motivasi yang sangat kuat untuk ikut serta dalam ajang ini adalah disamping keinginan memperoleh legitimasi sebagai Guru profesional atau Guru yang kompeten, tentunya daya tarik dari disediakannya tunjangan profesi dan fasilitas lainnya yang lumayan menggiurkan.

Dalam Permendiknas Nomor 11 tahun 2011 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan di kecamatan Sidikalang disebutkan bahwa sertifikasi bagi Guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio alias penilaian kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi Guru, dengan mencakup Sepuluh komponen yaitu : Kualifikasi akademik, Pendidikan dan pelatihan, Pengalaman mengajar, Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, Penilaian dari atasan dan pengawas, Prestasi akademik, Karya pengembangan profesi, Keikutsertaan dalam forum ilmiah, Pengalaman organisasi di bidang pendidikan dan sosial, dan Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Seiring dengan Program Sertifikasi Guru di SMA Negeri 1 Sidikalang, program ini nyaris tidak pernah sepi dari masalah. Mulai dari prioritas umur dalam instansi hingga polemic kuota selalu mewarnai pemberitaan media di banyak daerah. Mengacu pada Permendiknas Nomor 11 Tahun 2011 dan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan, tujuan pelaksanaan Sertifikasi

itu boleh dikatakan mulia. Yaitu untuk meningkatkan mutu para Guru. Misalnya, kualitas Guru meningkat, mutu anak didik juga semakin bagus. Ekspektasi SMA Negeri 1 Sidikalang seperti yang tertuang dalam Undang-undang cukup baik. Namun, baik atau tidaknya Kualitas Pendidikan secara Nasional berada di pundak Tenaga Pendidiknya. Pemberian TPP satu kali gaji pokok perbulan itu sesungguhnya bentuk apresiasi pemerintah terhadap para guru yang telah dinyatakan lulus uji kompetensi atau profesionalitas. Namun, rupanya Guru masih memandang dari sudut pandang keliru. TPP itu dianggap sudah menjadi hak guru dan kewajiban pemerintah untuk membayar. Padahal, para Guru mestinya lebih dulu mengedepankan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai tenaga pendidik yang terus dituntut untuk meningkatkan mutu.

Permasalahan sertifikasi di SMA Negeri 1 Sidikalang tidak hanya dirasakan oleh para Guru yang belum memiliki kualifikasi D4/S1 saja, yang jelas-jelas tidak bisa diikutsertakan, tetapi bagi para Guru yang sudah berkualifikasi D4/S1 pun tetap akan menjumpai sejumlah persoalan, terutama kesulitan guna memenuhi empat komponen lainnya, yaitu komponen : Pendidikan dan pelatihan, Keikutsertaan dalam forum ilmiah, Prestasi akademik, dan Karya pengembangan profesi. Saat ini, keempat komponen tersebut belum sepenuhnya dapat diakses dan dikuasai oleh setiap guru, khususnya oleh guru-guru yang lebih muda dibandingkan dengan guru yang lebih tua. Frekuensi kegiatan pelatihan dan pendidikan, forum ilmiah, dan momen-momen lomba akademik relatif masih terbatas. Begitu juga budaya menulis, budaya meneliti dan berinovasi belum sepenuhnya berkembang di kalangan Guru. Upaya Pemerintah Dinas Pendidikan terhadap tenaga Guru

sebenarnya telah dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia, melalui berbagai bentuk kebijakan.

Ditetapkannya Permendiknas nomor 11 Tahun 2011 Undang Undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan merupakan dasar kebijakan untuk memperkuat eksistensi tenaga kependidikan sebagai tenaga profesional, seperti profesi-profesi yang lainnya. Kualitas profesi tenaga Guru selalu diupayakan, baik melalui ketentuan kualifikasi pendidikannya maupun kegiatan *in-service training*, dengan berbagai bentuknya seperti: pendidikan dan latihan (diklat), penataran dan pelibatan dalam berbagai seminar untuk meng-*update* wawasannya dalam kompetensi dan akademik. Pemerintah Dinas Pendidikan Kecamatan Sidikalang mulai menyadari betapa strategisnya peran tenaga Guru dalam mengantarkan generasi muda untuk menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan kompetitif sehingga mampu mewujudkan suatu kesejahteraan bersama. SMA Negeri 1 Sidikalang merupakan salah satu sekolah rujukan yang berada di Kabupaten Dairi. SMA Negeri 1 Sidikalang memiliki guru sebanyak 78 orang. Dengan jumlah yg telah disertifikasi sebanyak 57, dan honorer sebanyak 18 orang. Proses pelaksanaan sertifikasi Guru di SMA Negeri 1 Sidikalang dilaksanakan melalui berbagai pihak yang terkait didalamnya, yaitu adanya keterlibatan dari Perguruan Tinggi sebagai pihak yang menyelenggarakan Sertifikasi Guru yang kemudian dikoordinasikan oleh pihak Dinas Pendidikan Kecamatan Sidikalang. Proses rekrutmen calon peserta sertifikasi guru di lingkungan SMANegeri 1 Sidikalang terdapat hal-hal yang sangat menarik untuk diketahui karena banyak guru yang sudah memenuhi syarat tapi belum menjadi guru yang dapat menerima sertifikasi.

Penyelewengan dalam pencalonan peserta sertifikasi terdapat nama-nama guru yang sesungguhnya tidak memenuhi syarat untuk menjadi salah seorang peserta sertifikasi guru, tetapi pada daftar pengumuman calon peserta sertifikasi Guru di lingkungan SMA Negeri 1 Sidikalang namanya tercantum. Masalah yang terjadi adalah adanya kecerobohan para birokrasi di lingkungan SMA Negeri 1 Sidikalang, terdapat unsur kesengajaan dari pihak tertentu yang menodai proses rekrutmen calon-calon sertifikasi guru itu. Dari penelitian yang dilakukan proses penerimaan sertifikasi guru lebih mengutamakan guru-guru yang lebih tua atau guru yang lebih lama mengajar di SMA tersebut dibandingkan guru yang lebih muda walaupun sudah memenuhi semua kriteria dalam penerimaan sertifikasi guru. Hal ini membuat terhambatnya proses guru dalam mendapatkan sertifikasi guru yang telah mereka upayakan dalam segala aspek atau sudah memenuhi segala syarat dalam proses penerimaannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengambil judul **“Evaluasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Guru dalam Meningkatkan Kinerja Guru (Studi Kasus SMA Negeri 1 Sidikalang Kabupaten Dairi)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Evaluasi Kebijakan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Guru dalam Meningkatkan Kinerja Guru Di SMA Negeri 1 Sidikalang Kabupaten Dairi?

2. Apa Saja Faktor Penghambat Evaluasi Kebijakan Menteri Pendidikan Nasional No 11 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Guru dalam Meningkatkan Kinerja Guru Di Sma Negeri 1 Sidikalang Kabupaten Dairi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengevaluasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Guru dalam Meningkatkan Kinerja Guru Di SMA Negeri 1 Sidikalang Kabupaten Dairi.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Evaluasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 11 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Guru dalam Meningkatkan Kinerja Guru Di SMA Negeri 1 Sidikalang Kabupaten Dairi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Diharapkan dapat meningkatkan wawasan peneliti dan pembaca terkait evaluasi peraturan menteri pendidikan nasional nomor 11 tahun 2011 tentang sertifikasi guru dalam Sidikalang Kabupaten Dairi)
2. Sebagai bahan rujukan peneliti lainnya dan pembaca untuk meningkatkan kinerja guru (studi kasus SMA Negeri 1 Sidikalang Kabupaten Dairi) mengetahui evaluasi peraturan menteri pendidikan nasional nomor 11 tahun 2011 tentang sertifikasi guru dalam meningkatkan kinerja guru (studi kasus SMA Negeri 1 Sidikalang Kabupaten Dairi)

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

2.1 Evaluasi

Evaluasi adalah suatu pengamatan atau apenilaian maupun penafsiran pada suatu hal yang dilakukan secara deskriptif, informatif, prediktif yang dilakukan secara sistematis. Selain itu ada beberapa pendapat para ahli tentang evaluasi yaitu antara lain Arikunto (2004:1) menyatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, evaluasi dilakukan dalam rangka mendapatkan informasi-informasi yang berguna bagi pihak pembuat keputusan untuk menentukan program/kebijakan/kegiatan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.

Dalam kegiatan pembelajaran evaluasi memiliki peranan penting dalam terwujudnya tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, maka evaluasi dalam pendidikan mencakup istilah-istilah yang sering digunakan dalam pelaksanaannya yaitu tes, pengukuran dan penilaian. Dengan demikian dapat disimpulkan evaluasi pembelajaran merupakan suatu proses atau kegiatan sistematis, berkelanjutan dan menyeluruh dalam rangka pengendalian, penjaminan dan penetapan kualitas (nilai dan arti) pembelajaran terhadap berbagai komponen pembelajaran.

Konsep evaluasi program yang relevan dengan manajemen pendidikan dapat dilihat dari tujuan khususnya. Sebagaimana dinyatakan oleh Sudjana (2006; 46) bahwa tujuan khusus evaluasi program ada 6 (enam), yaitu : (1) memberikan masukan bagi perencanaan program; (2) menyajikan masukan bagi pengambil keputusan yang berkaitan dengan tindak lanjut , perluasan atau penghentian program; (3) memberikan masukan bagi pengambil keputusan tentang modifikasi atau penghentian program; (4) memberikan masukan yang berkenaan dengan factor pendukung dan penghambat program; (5) memberikan masukan untuk kegiatan motivasi dan pembinaan (pengawasan, supervise, dan monitoring); serta (6) menyajikan data tentang landasan keilmuan bagi evaluasi program.

Konsep diatas juga didukung oleh hasil penelitian yang relevan, seperti yang dilakukan oleh Bachtiar Dwi Kurniawan (2010) berjudul “Implementasi kebijakan Sertifikasi Guru dalam Rangka Meningkatkan Profesionalitas Guru di Kota Yogyakarta” penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut. Pertama, dari segi proses pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru baik di tingkat Dinas Pendidikan Kota dan LPTK bias dikatakan berjalan dengan baik dan lancar, hanya ada sedikit persoalan, keduanya memiliki masalah berkait dengan keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Hal itu terjadi lantaran pemerintah pusat tidak mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan implementasi program. Kedua, dari segi dampak kebijakan, sertifikasi belum dapat meningkatkan profesionalitas guru secara signifikan. Sikap para guru dalam menjalankan kebijakan sertifikasi terlihat hanya mengejar kesejahteraan semata, mutu pengajaran kurang mendapat perhatian.

2.2 Teori Evaluasi

Menurut William N. Dunn (1999) dalam Nugroho (2014), istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pembagian angka (rating), dan penilaian (assesment). Evaluasi berkenaan dengan menghasilkan informasi yang valid dan manfaat hasil kebijakan. Evaluasi dapat memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa valid kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah mampu diraih melalui tindakan dari kebijakan publik; memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan target; memberikan sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk juga perumusan masalah dan rekomendasi. Meskipun berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi lebih berkenaan dengan kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan (Nugroho, 2004). Dunn menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik dengan tabel berikut:

Tabel 2. 1 Kriteria Evaluasi menurut Dunn

Tipe Kriteria	Pertanyaan	Ilustrasi
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?	Unit pelayanan
Efisiensi	Seberapa banak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	Unit biaya, manfaat bersih, rasio cost- benefit
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?	Biaya tetap, efektivitas tetap.

Pemerataan	Apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?	Kriteria pareto, Kriteria Kaldor-Hicks, Kriteria Rawls
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai kelompok tertentu?	Konsistensi dengan survei warga Negara
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?	Program publik harus merata dan efisien.

Sumber: Nugroho R. 2014. *Public Policy*

Evaluasi kebijakan dibagi menjadi tiga menurut waktunya, yaitu pada saat sebelum dilaksanakan, pada waktu dilaksanakan, dan setelah dilaksanakan. Evaluasi pada waktu pelaksanaan biasanya disebut evaluasi proses, sedangkan evaluasi pada waktu pelaksanaan disebut sebagai evaluasi konsekuensi (output) kebijakan dan/atau evaluasi dampak/pengaruh (outcome) kebijakan. Evaluasi setelah pelaksanaan disebut juga evaluasi sumatif. Pengembangan pendekatan evaluasi implementasi kebijakan menurut Dunn (1999) dalam Nugroho (2014) terdiri dari tiga pendekatan, yaitu evaluasi semu, evaluasi formal, dan evaluasi keputusan teoritis (Nugroho, 2014).

2.3 Pendidikan

Dalam perspektif teoritik, pendidikan seringkali diartikan dan dimaknai orang secara beragam, bergantung pada sudut pandang masing-masing dan teori yang dipegangnya. Terjadinya perbedaan penafsiran pendidikan dalam konteks akademik merupakan sesuatu yang lumrah, bahkan dapat semakin memperkaya berfikir manusia dan bermanfaat untuk pengembangan teori itu sendiri. Tetapi untuk kepentingan kebijakan nasional, pendidikan dapat dirumuskan secara jelas dan mudah dipahami

oleh semua pihak yang terkait dengan pendidikan, sehingga setiap orang dapat mengimplementasikan secara tepat dan benar dalam setiap praktik pendidikan. Untuk mengetahui definisi pendidikan dalam perspektif kebijakan, kita telah memiliki rumusan formal dan operasional, sebagaimana termaktub dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS, yakni: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

1. Usaha sadar dan terencana.

Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana menunjukkan bahwa pendidikan adalah sebuah proses yang disengaja dan dipikirkan secara matang (proses kerja intelektual). Oleh karena itu, di setiap level manapun, kegiatan pendidikan harus disadari dan direncanakan, baik dalam tataran nasional (makroskopik), regional/provinsi dan kabupaten kota (mesoskopik), institusional/sekolah (mikroskopik) maupun operasional (proses pembelajaran oleh guru). Berkenaan dengan pembelajaran (pendidikan dalam arti terbatas), pada dasarnya setiap kegiatan pembelajaran pun harus direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diisyaratkan dalam Permendiknas RI No. 41 Tahun 2007. Menurut Permediknas ini bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi

ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar.

2. Mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya.

Pada pokok pikiran yang kedua ini adanya pengerucutan istilah pendidikan menjadi pembelajaran. Jika dilihat secara sepintas mungkin seolah-olah pendidikan lebih dimaknai dalam setting pendidikan formal semata (persekolahan). Terlepas dari benar-tidaknya pengerucutan makna ini, pada pokok pikiran kedua ini, saya menangkap pesan bahwa pendidikan yang dikehendaki adalah pendidikan yang bercorak pengembangan (developmental) dan humanis, yaitu berusaha mengembangkan segenap potensi didik, bukan bercorak pembentukan yang bergaya behavioristik. Selain itu, saya juga melihat ada dua kegiatan (operasi) utama dalam pendidikan:

- a. mewujudkan suasana belajar

Berbicara tentang mewujudkan suasana pembelajaran, tidak dapat dilepaskan dari upaya menciptakan lingkungan belajar, diantaranya mencakup: (a) lingkungan fisik, seperti: bangunan sekolah, ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang BK, taman sekolah dan lingkungan fisik lainnya; dan (b) lingkungan sosio-psikologis (iklim dan budaya belajar/akademik), seperti: komitmen, kerja sama, ekspektasi prestasi, kreativitas, toleransi, kenyamanan, kebahagiaan dan aspek-aspek sosio-emosional lainnya, yang memungkinkan peserta didik untuk

melakukan aktivitas belajar. Baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosio-psikologis, keduanya didesain agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan segenap potensinya. Dalam konteks pembelajaran yang dilakukan guru, di sini tampak jelas bahwa keterampilan guru dalam Mengelola Kelas (classroom management) menjadi amat penting. Dan di sini pula, tampak bahwa peran guru lebih diutamakan sebagai fasilitator belajar siswa.

b. Mewujudkan proses pembelajaran

Upaya mewujudkan suasana pembelajaran lebih ditekankan untuk menciptakan kondisi dan pra kondisi agar siswa belajar, sedangkan proses pembelajaran lebih mengutamakan pada upaya bagaimana mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau kompetensi siswa. Dalam konteks pembelajaran yang dilakukan guru, maka guru dituntut untuk dapat mengelola pembelajaran (learning management), yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran (lihat Permendiknas RI No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses). Di sini, guru lebih berperan sebagai agen pembelajaran (Lihat penjelasan PP 19 tahun 2005), tetapi dalam hal ini saya lebih suka menggunakan istilah manajer pembelajaran, dimana guru bertindak sebagai seorang planner, organizer dan evaluator pembelajaran). Sama seperti dalam mewujudkan suasana pembelajaran, proses pembelajaran pun seyogyanya didesain agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan segenap potensi yang dimilikinya, dengan mengedepankan pembelajaran yang berpusat pada siswa (student-centered) dalam bingkai model dan strategi pembelajaran aktif (active learning), ditopang oleh peran guru sebagai fasilitator belajar

3. Memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pokok pikiran yang ketiga ini, selain merupakan bagian dari definisi pendidikan sekaligus menggambarkan pula tujuan pendidikan nasional kita. Disana tertera tujuan yang berdimensi ke-Tuhan-an, pribadi, dan sosial. Artinya, pendidikan yang dikehendaki bukanlah pendidikan sekuler, bukan pendidikan individualistik, dan bukan pula pendidikan sosialistik, tetapi pendidikan yang mencari keseimbangan diantara ketiga dimensi tersebut. Jika belakangan ini gencar disosialisasikan pendidikan karakter, dengan melihat pokok pikiran yang ketiga dari definisi pendidikan ini maka sesungguhnya pendidikan karakter sudah implisit dalam pendidikan, jadi bukanlah sesuatu yang baru. Selanjutnya tujuan-tujuan tersebut dijabarkan ke dalam tujuan-tujuan pendidikan di bawahnya (tujuan level meso dan mikro) dan dioperasionalkan melalui tujuan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Ketercapaian tujuan – tujuan pada tataran operasional memiliki arti yang strategis bagi pencapaian tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan uraian di atas, kita melihat bahwa dalam definisi pendidikan yang tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003, tampaknya tidak hanya sekedar menggambarkan apa pendidikan itu, tetapi memiliki makna dan implikasi yang luas tentang siapa sesungguhnya pendidik itu, siapa peserta didik (siswa) itu, bagaimana seharusnya mendidik, dan apa yang ingin dicapai oleh pendidikan.

2.4 Sertifikasi Guru

Sertifikasi Guru atau Sergur merupakan sebuah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang sudah memenuhi standar profesional atau kelayakan seorang guru dalam Kegiatan Belajar Mengajar di sekolah. Seorang guru yang sudah bersertifikat, akan memiliki nilai lebih yang dapat digunakan sebagai nilai tambah ketika seorang guru akan berpindah ke sekolah lain yang mungkin lebih menjanjikan. Sertifikasi Guru ini diberikan kepada tenaga pendidik yang sudah memenuhi syarat. Pengakuan status guru sebagai pendidik profesional bersertifikat diperoleh dari penyedia pelatihan dan ke lembaga pendidikan setelah lulus tes bakat diselenggarakan oleh dinas pendidikan lembaga terakreditasi atau sertifikasi.

Program sertifikasi sudah ada di Indonesia diperkenalkan sejak tahun 2007 Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 18 Tahun 2007 tentang sertifikasi guru internal Stasiun kereta. Dasar hukum pelaksanaan sertifikasi guru Indonesia dapat ditelusuri kembali ke amanat UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan UU RI 14 Tentang Guru dan Dosen. Hukum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan negara-negara bangsa yang harus memiliki guru kualifikasi dan sertifikasi minimal tingkat kompetensi mengajar, kondisi fisik dan spiritual, dan mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya untuk mencapai tujuan pendidikan kerakyatan. mandat ini lebih lanjut ditegaskan dalam UU RI Nomor 14 dalam kaitannya dengan guru dan dosen Pasal 8, yang mengatakan guru harus memiliki kualifikasi akademik, kualifikasi pendidikan, kondisi fisik, spiritual, dan

mereka memiliki kemampuan untuk melakukan implementasi tujuan pendidikan nasional.

Undang-Undang Nomor 14 Republik Indonesia Tahun 2005 melaporkan guru dan dosen bahwa program sertifikasi adalah sebuah proses penerbitan sertifikat kepada guru sebagai bukti pengakuan resmi bagi guru sebagai pendidik profesional. Menurut Muslich (2007: 2), sertifikasi adalah suatu proses penerbitan sertifikat mengajar bagi guru yang memiliki memenuhi persyaratan tertentu, yaitu kualifikasi akademik, berkualitas, sehat jasmani dan rohani, dan mereka memiliki kemampuan untuk menciptakan mewujudkan tujuan pendidikan nasional peningkatan halus dalam kesejahteraan.

Menurut Mulyasa (2007: 33) Kualifikasi Guru adalah proses pengakuan formal bagi guru yang telah memiliki kualifikasi untuk itu menyediakan layanan pelatihan di unit pendidikan. Jadi Anda bisa berdasarkan peraturan dan pendapat diakui bahwa proses sertifikasi guru sertifikat guru bagi guru yang telah selesai keterampilan dan kualifikasi yang telah ditentukan sebelumnya dari pemerintah untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Payong (2011, 76-77) mengatakan bahwa pemikiran dasar yang dibutuhkan guru saksi lift dari lereng profesi guru psikologi dan sosiologis yang seharusnya terlindung semoga melalui program sertifikasi mempengaruhi pertumbuhan harga diri dan seorang guru yang bangga dengan profesinya. Sinyal dari teori Maslow bahwa guru dianggap sebagai individu adalah keinginan untuk diakui dan penghargaan tertentu. Ketika anda bias pengakuan publik atas profesinya, harga diri sebagai guru lebih

banyak dicetak. Pelaksanaan program sertifikasi guru tujuannya, antara lain: (a) memilih kualifikasi guru senior yang diharapkan mampu melakukannya untuk mencapai tujuan pendidikan kerakyatan, (b) meningkatkan kualitas proses dan hasil pendidikan, (c) meningkatkan atau melindungi nilai guru dalam profesi guru, yaitu menjamin pekerjaan guru sebagai pekerjaan pelayanan pelatihan dan (d) meningkatkan keterampilan profesionalisme guru.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

NO.	Nama/Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1	Widiyaka, Netty Herawati, Martoyo/2013	Evaluasi Program Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Dinas Pendidikan Kubu Raya.	Penelitian menggunakan metode jenis penelitian deskriptif dalam pendekatan kualitatif.	Program sertifikasi guru yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kubu Raya dari segi proses belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan prosedur serta fasilitas, sarana dan prasarana yang digunakan kurang dimanfaatkan secara maksimal.
2	Ahmad Yantono/2016	Evaluasi Program Tunjangan Profesi Guru di SMP Negeri Kabupaten Kendal.	Teknik yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif.	Kompetensi guru dalam manajemen waktu pembelajaran sesuai RPP belum sesuai dengan tujuan pembelajaran.
3	Raymond S. Worotikan, Lisbeth Mananeke,	Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan Terhadap	Penelitian ini menggunakan penelitian	Pelaksanaan sertifikasi guru telah memenuhi standar yang disyaratkan

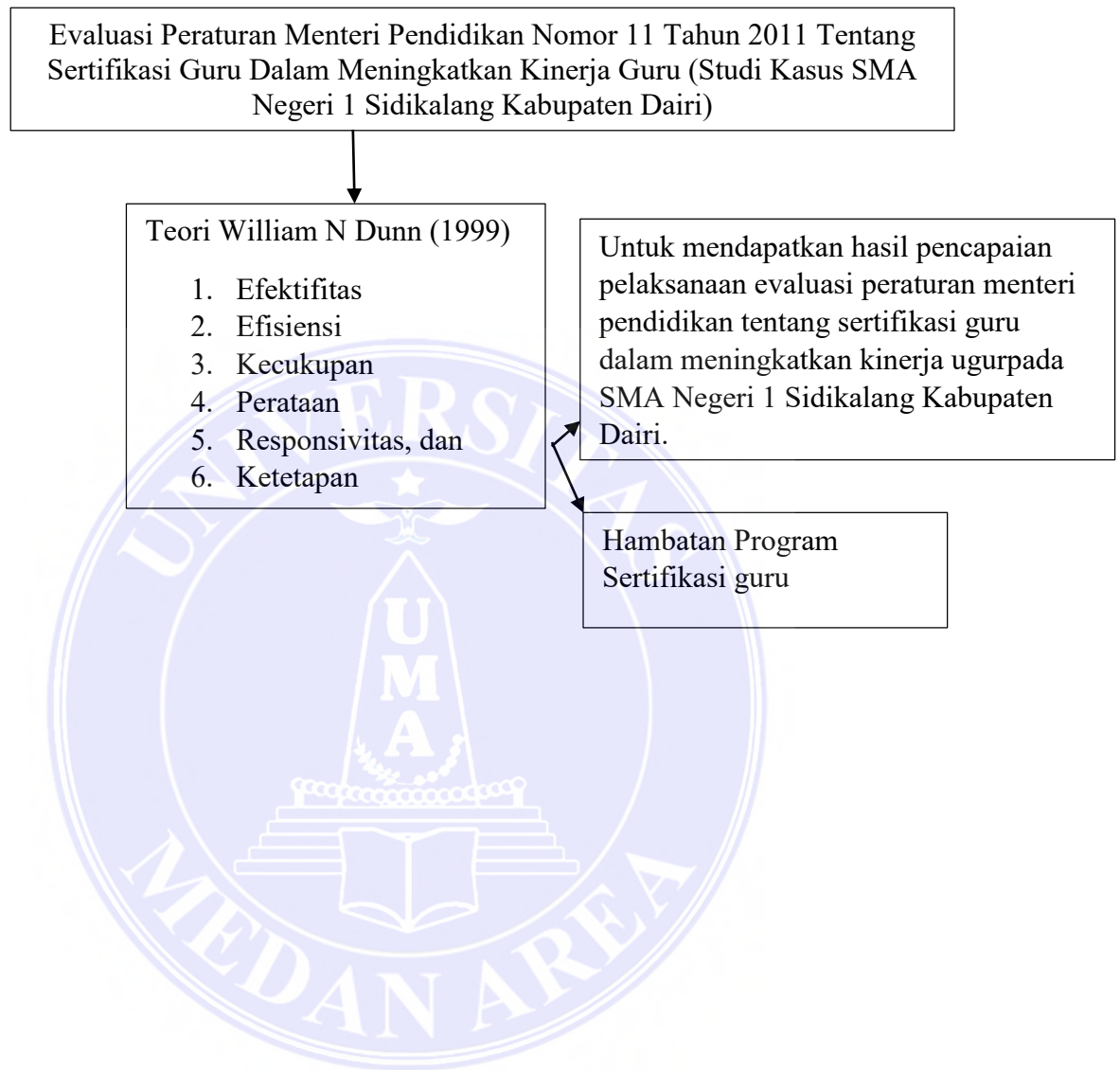
	Genita G. Lumintang /2016	Kinerja Guru Sertifikasi Pada SMP Katolik Hati Kudus Karombasan Manado.	kualitatif deskriptif.	dalam undang-undang dan ketentuan yang berlaku.
4	Sadewo, Yosua Damas/2018	Evaluasi Pelaksanaan Program Sertifikasi Guru Sekolah Dasar Kabupaten Wonosobo.	Metode penelitian yang dilakukan yaitu metode GAP analisis	Hasil penelitian yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi program sertifikasi guru di Kabupaten Wonosobo, maka dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan program sertifikasi yang dilaksanakan sudah sesuai dengan acuan dalam pedoman namun hasil dari pelaksanaan program sertifikasi belum memenuhi standar. Hal ini menunjukkan bahwa hasil program sertifikasi, melalui analisis gap menunjukkan adanya kesenjangan dengan rata-rata prosentase sebesar 80% dari keseluruhan aspek yang dikaji.
5.	Renzo Novriadi Putra	Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 Tentang	penelitian Deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi analisis kualitatif	Hasil penelitian yaitu pelaksanaan implementasi kebijakan peraturan menteri belum dapat dikatakan efektif. Hal ini terlihat dari

		Sertifikasi Guru Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Guru Di Smk Negeri 1 Simeulue Timur Kabupaten Simeulue		masih banyaknya kekurangan dalam pengajaran, karena masih sedikit guru yang sertifikasi.
--	--	---	--	--

2.6 Kerangka Berpikir

Menurut Sugiyono (2012:89) kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Kerangka pemikiran adalah gambaran dalam tinjauan pustaka atas dasar teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian. Kerangka pemikirian pada intinya berusaha menjelaskan konstelasi hubungan antar variabel yang diteliti. Untuk mendapatkan sebuah kerangka pemikiran yang mendalam, tidak menyimpulkan hanya dari fakta yang dapat terindra, atau hanya dari sekedar informasi-informasi yang terpenggal. Selain itu diperlukan sebuah pemikiran yang cerdas dan cemerlang akan setiap informasi yang dimilikinya dan berupaya dengan keras menyimpulkan sesuatu kesimpulan yang memunculkan keyakinan.

Bagan 1. 1 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan bentuk kualitatif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi sekarang ini, termasuk berbagai tipe penelitian sehingga ditemukan hubungan yang mungkin terjadi diantara variabel-variabel. Sejalan dengan permasalahan yang dirumuskan dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka dalam penelitian ini penulis memberikan gambaran tentang suatu fenomena dengan jalan mengumpulkan data, menyusun, menganalisa dan menginterpretasikannya sehingga pada akhirnya dapat mendeskripsikan proses sertifikasi dalam jabatan SMA Negeri 1 Sidikalang Kabupaten Dairi.

Menurut Kirk dan Miller (1986:9) mendefenisikan bahwa penelitian kualitatif deskriptif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan social yang fundamental tergantung kepada pengamatan manusia dalam kawasan sendiri dan berhubungan dengan orang-orang atau masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian yang dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial dan hubungan kekerabatan.

Pada dasarnya penelitian ini dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan dan mengetahui usaha yang dilakukan untuk mengevaluasi sertifikasi guru dalam peningkatan system pendidikan di Indonesia.

Dalam penelitian ini digunakan analisis jenis data kualitatif yaitu penelitian yang mendeskripsikan apa yang terjadi pada saat melakukan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif yang dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang teliti dengan melukiskan keadaan subyek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya (Nawawi,2003).

Berbeda dengan pendapat Maleong (2007: 6) yang memaknai penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Lebih pas dan cocok digunakan untuk meneliti hal-hal yang berkaitan dengan penelitian perilaku, sikap, motivasi, persepsi dan tindakan subjek. Dengan kata lain, jenis penelitian tersebut, tidak bisa menggunakan metode kuantitatif.

Penelitian kualitatif menurut Koentjaraningrat (1993:89) mengartikan bahwa penelitian kualitatif adalah desain penelitian yang memiliki tiga format. Ketiga format tersebut meliputi penelitian deskriptif, verifikasi dan format Grounded research. Penelitian kualitatif salah satu penelitian yang lebih cocok digunakan untuk penelitian yang tidak berpola. Karena berpola, kamu bisa menggunakan desain ini untuk membantu dalam penelitian.

Menurut David Williams (1995) penelitian kualitatif adalah upaya peneliti mengumpulkan data yang didasarkan pada latar alamiah. Tentu saja, karena dilakukan secara alamiah atau natural, hasil penelitiannya pun juga ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berbeda dengan pendapat Sugiono (2005) yang mengartikan bahwa penelitian kualitatif lebih cocok digunakan untuk jenis penelitian yang memahami tentang fenomena sosial dari perspektif partisipan. Secara sederhana, dapat pula diartikan sebagai penelitian yang lebih cocok digunakan untuk meneliti kondisi atau situasi objek penelitian.

Sedangkan menurut Saryono, metode penelitian kualitatif selain digunakan untuk menyelidiki, menemukan dan menggambarkan objek yang diteliti. Ternyata juga dapat digunakan untuk menjelaskan atau menuliskan keistimewaan dari pengaruh sosial yang kemudian dijelaskan dan diukur menggunakan pendekatan kuantitatif.

Pendapat Moleong senada dengan Bogdan dan Taylor (1975), dimana mereka mengartikan bahwasanya penelitian kualitatif juga termasuk metodologi yang dimanfaatkan untuk prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Data deskriptif adalah data yang ditulis menggunakan kata-kata secara mendetail.

3.2. Lokasi Dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Kajian dilakukan di SMA Negeri 1 Sidikalang untuk mencari permasalahan dan mengumpulkan informasi sertifikasi guru dalam proses pembelajaran di lokasi. Peneliti

akan melihat secara langsung sudah sejauh mana program sertifikasi guru dijalankan pada sekolah tersebut.

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan yang di butuhkan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini di mulai pada bulan mei 2023 dan melaksanakan seminar proposal pada bulan juni 2023. Dan waktu penelitian yang di lakukan oleh peneliti berkisar 2 bulan yaitu pada bulan Juni 2023 sampai pada bulan Agustus 2023.

Tabel 3. 1 Waktu Pelaksanaan

NO.	Uraian Kegiatan	Mei	Juni	Agust	Des	Feb
		2023	2023	2023	2023	2023
1	Penyusunan Proposal					
2	Seminar Proposal					
3	Perbaikan Proposal					
4	Pengambilan Data Penelitian dan Penyusunan Skripsi					
5	Seminar Hasil					
6	Perbaikan Skripsi					
7	Sidang Meja Hijau					

Sumber: diolah oleh peneliti, 2023

3.3.3 Informan Penelitian

1. Informan Kunci

Informan kunci merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah kepala sekolah SMA Negeri 1 Sidikalang Kabupaten Dairi

2. Informan Utama

Informan utama merupakan individu maupun kelompok yang dijadikan sebagai sumber data atau informasi primer dalam memberikan gambaran teknis terkait masalah penelitian. Informan utama dalam penelitian kualitatif mirip dengan “aktor utama” dalam sebuah kisah atau cerita. Pada penelitian ini yang menjadi informan utama adalah guru-guru yang telah menerima sertifikasi guru.

3. Informan Tambahan

Informan tambahan merupakan individu maupun kelompok yang dijadikan sebagai sumber data atau informasi sekunder dalam memberikan gambaran pendukung dari data utama terkait masalah penelitian. Informan pendukung merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Informan tambahan pada penelitian ini adalah guru-guru honore, guru yang belum menerima sertifikasi serta siswa-siswi di SMA Negeri 1 Sidikalang.

Tabel 3. 2 Informan Penelitian

NO.	Jenis Informan	Keterangan
1	Informan Kunci	Kepala sekolah SMA Negeri 1 Sidikalang
2	Informan Utama	Guru Penerima Sertifikasi
3	Informan Tambahan	Guru Honorer, Guru Belum Menerima Sertifikasi

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik utama pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan:

- a) Teknik wawancara, yaitu teknik dengan melakukan tanya jawab secara langsung dan mendalam kepada subyek penelitian guna pengumpulan dan menggali data primer.
- b) Menurut Sugiyono (2010:194), Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.
- c) Observasi partisipan, (participant observation), yaitu pengumpulan data penelitian ini akan dilakukan melalui kegiatan observasi atau pengamatan langsung terhadap obyek analisis untuk menggali aspek-aspek yang relevan dan penting sebagai dasar analisis dan interpretasi yang akan dilakukan. Dengan ini peneliti akan mengamati peraturan menteri pendidikan terkait sertifikasi guru di SMA Negeri 1 Sidikalang.
- d) Dokumentasi, yaitu cara mengumpulkan data melalui dokumen resmi dari lembaga/organisasi yang telah melaksanakan program sertifikasi guru dalam jabatan, seperti arsip-arsip, berkas laporan, dokumen perencanaan, rencana strategis, perencanaan pendidikan yang sudah ada, peraturan, foto-foto kegiatan.

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif artinya setelah data-data terkumpul baik primer maupun sekunder diklasifikasikan dan

selanjutnya data tersebut diolah dan pengolahan data lebih banyak digunakan ungkapan kalimat sebagai interpretasi dari data-data yang diolah tersebut. Dalam analisis kualitatif, data yang muncul adalah bukan rangkaian angka-angka, akan tetapi berupa kata-kata yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai cara misalnya dengan observasi, wawancara, intisari dokumen, pita dokumen, dan biasanya diproses melalui pencatatan pengetikan penyuntingan tetapi analisisnya tetap menggunakan kata-kata yang disusun ke dalam teks yang diperluas. Tahap analisis data menurut Moleong (2004: 103) dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Sebagai konsep dasar langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data, pertama-tama mengorganisasikan data, data yang terkumpul banyak sekali yang terdiri dari catatan lapangan, komentar peneliti, dokumen berupa laporan dan sebagainya. Sementara pekerjaan analisis data dalam hal ini adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikan.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu kegiatan proses penghalusan atau pemulihan data yang diperoleh di lapangan, proses tersebut untuk lebih menyederhanakan data yang diperoleh dengan memberi kode, mengklasifikasi, menelusuri tema-tema, membuat gugus, menulis memo, dan memilah-milah bagian-bagian yang tidak relevan dengan fokus penelitian.

3. Penyajian data

Penyajian data adalah setelah kegiatan reduksi dilakukan, kemudian data tersebut disajikan menjadi kumpulan informasi yang telah disusun, sehingga dari informasi tersebut dapat ditarik kesimpulan sementara yang akan diuji lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Pada umumnya penyajian data disajikan dalam bentuk narasi dan tidak menutup kemungkinan penyajian data dapat dilakukan dengan gambar-gambar matrik agar lebih mudah dimengerti semua pihak.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir, dari suatu analisis data yang berusaha mencari arti terhadap data yang disajikan dan berusaha menghubungkan data dengan gejala sosial lainnya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Evaluasi Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Meningkatkan Kinerja Guru di SMAN 1 Sidikalang, sudah terimplementasi dengan baik, karena efektivitas, evaluasi peraturan menteri pendidikan nasional nomor 11 tahun 2011 tentang sertifikasi guru dalam meningkatkan sertifikasi guru di SMAN 1 Sidikalang sudah berjalan dengan baik dilihat dari bagaimana guru-guru di SMAN 1 Sidikalang menjadi guru yang profesional dengan selalu berusaha mengikuti program sertifikasi guru dengan prosedur yang sudah ditetapkan, dan pendidikan profesi guru sudah mencapai target dan dilakukan secara efisien di SMAN 1 Sidikalang. Dilihat dari bagaimana perangkat-perangkat yang berwenang dalam proses ini dan para pengurus yang terlibat dalam proses sertifikasi guru sangat antusias dalam melayani para penerima sertifikasi guru. Calon penerima sertifikasi juga diuntungkan dari banyaknya sosialisasi dan pelatihan tenaga pendidik untuk membentuk mereka menjadi guru yang memiliki skill yang baik sebagai guru pengajar ataupun guru yang sudah bersertifikasi. Guru-guru sertifikasi di SMAN 1 Sidikalang sudah menjalankan dan memenuhi segala aspek maupun kategori untuk menerima sertifikasi. Dilihat dari bagaimana mereka menilai dan memberikan aturan dalam menerima sertifikasi guru.

2. Faktor penghambat dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Meningkatkan Kinerja Guru di SMAN 1 Sidikalang Kabupaten Dairi adalah Perataannya mengutamakan kualitas para pengajar, karena sekolah tersebut merupakan sekolah favorit selain itu sekolah juga mengutamakan guru-guru yang lebih berpengalaman atau yang sudah lama mengajar. Seperti halnya juga sekolah-sekolah pada umumnya pasti selalu mengutamakan kualitas para pengajar agar murid-muridnya dapat mengerti apa yang diajarkan oleh guru-guru, sehingga sekolah dapat berkembang dengan baik melalui prestasi-prestasi yang didapatkan oleh siswa-siswi melalui pengajaran guru-guru yang baik dan benar.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, maka saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian ini adalah harus memerhatikan perekrutan calon sertifikasi yang merata dan adil untuk tidak merugikan guru-guru yang telah berusaha memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dalam mendapatkan sertifikasi tersebut. Dengan adanya pemerhatian terhadap perekrutan calon sertifikasi guru tersebut, itu akan menjadi acuan bahwa sertifikasi guru adalah untuk semua guru dengan semua kategori tanpa adanya perbedaan umur dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Albi Anggito, J. S. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bojong Genteng: CV. Jejak.
- Arikunto. (2004). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. In *Edisi Kelima* (p. 1). Jakarta: Rineka Cipta.
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Koentjaraningrat. (1993). *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Kunandar. (2008). *Guru Profesional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Magdalena, I. (2020). *Evaluasi Pembelajaran Dan Praktek*. Jakarta: CV. Jejak (Jejak Publisher).
- Maleong. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mangkunegara, A. P. (2005). *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung: PT. Defika Aditama.
- Midoyoko, E. P. (2014). *Evaluasi Program Pembelajaran: Panduan Praktis Bagi Pendidik Dan Calon Pendidik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Moleong. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho. (2004). *Kebijakan Publik, Formulasi, Imolementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Payong. (2011). *Sertifikasi Profesi Guru "Konsep Dasar, Problematika, dan Implementasinya"*. Jakarta: PT. Indeks.
- Putra, R. N. (n.d.). Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Guru Di SMK Negeri 1 Simeuleu Kabupaten Simeuleu.
- Raymon, W. L. (2016). Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan Terhadap Guru Sertifikasi Pada SMP Katolik Hati Kudus Korambasan Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Volume 16 NO. 04.
- Sagala, S. (2009). *Kemampuan Profesional Guru Dan Tenaga Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sandu Siyoto, A. S. (2015). *Pasar Metodologi Penelitian*. Karangayar: Literasi Media Publishing.
- Sari, Z. A. (2012). *Evaluasi Program Sertifikasi Guru Di Madrasah Aliyah Negeri Sukaharjo*.

- Silitonga, D. (2022). *Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik*. Banyumas: Zahira Media Publisher.
- Sudjana. (2006). *Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Rinerka Cipta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutanto, A. (2016). *Manajemen Peningkatan Kinerja Guru Konsep Strategi dan Implementasinya*. Jakarta: Prenada Media.
- Suyanti, A. T. (2013). *Strategi Meningkatkan Kualifikasi Dan Kualitas Guru di Era Global*. Jakarta: Erlangga.
- Umar, H. (2005). *Evaluasi Kinerja Perusahaan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Widodo. (2017). *Metodologi Penelitian: Populer Dan Praktis*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- William N, D. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University.

JURNAL

- D. I., Pertama, M., & Tanjung, N. (n.d.). EVALUASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU *EVALUATION POLICY CERTIFICATION of TEACHERS in JUNIOR HIGH SCHOOL the COUNTRY 1 TANJUNG TABALONG REGENCY*. 1(1), 153–171.
- Widiyaka, Herawati, N., & Martoyo. (2013). Evaluasi Program Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Tesis PMIS*, 1–20.
- Raymon, W. L. (2016). Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan Terhadap Guru Sertifikasi Pada Smp Katolik Hati Kudus Korambasan Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Volume 16 No. 04.
- Mulyasa. (2007). Kualifikasi Guru Sebagai Pengakuan Formal Untuk Menjadi Profesi Seorang Guru. *Sertifikasi Guru*, 33.

SKRIPSI

- Putra, R. N. (n.d.). Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Guru Di SMK Negeri 1 Simeuleu Kabupaten Simeuleu.

- Sari, Z. A. (2012). Evaluasi Program Sertifikasi Guru Di Madrasah Aliyah Negeri Sukaharjo. (Mulyasa, Kualifikasi guru, 2007)
- Sadewo, Y. D. (2018). *Evaluasi Pelaksanaan Program Sertifikasi Guru Sekolah Dasar Kabupaten Wonosobo* (Doctoral dissertation, Magister Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana FKIP-UKSW).
- Widiaka 11210043. (2013). *Evaluasi Program Sertifikasi Guru dalam Jabatan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya*. Tanjungpura University.
- Worotikan, R. S. (2016). Evaluasi pelaksanaan pekerjaan terhadap kinerja guru sertifikasi pada Smp Katolik Hati Kudus Karombasan Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4).
- Yantono, A. (2016). Evaluasi Program Tunjangan Profesi Guru di SMP Negeri Kabupaten Kendal. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 3(2), 277-293.

LAMPIRAN

A. PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dilakukan dengan membagi dalam 6 (enam) kelompok pertanyaan sesuai dengan teori evaluasi yang disampaikan oleh William N. Dunn (2003), pertanyaan tersebut terdiri dari :

1. Efektifitas

- 1) Apakah proses pelaksanaan sertifikasi guru ini berjalan dengan efektif bagi guru SMAN 1 Sidikalang?
- 2) Apakah yang menjadi keuntungan dalam penerimaan sertifikasi guru?
- 3) Bagaimana keefektifitasan proses pelaksanaan sertifikasi guru di SMAN 1 Sidikalang?

2. Efisiensi

- 1) Bagaimana efisiensi dalam tahap penerimaan sertifikasi guru?
- 2) Apakah yang menjadi kendala bapak/ibu dalam tahap pengambilan sertifikasi tersebut?

3. Kecukupan

- 1) Apakah ada pengawasan (kecukupan) yang dilakukan mulai dari sosialisasi, dan tahapan dalam proses sertifikasi guru?
- 2) Apa saja yang menjadi bekal yang dibawa untuk pengambilan sertifikasi guru?
- 3) Apakah ada sosialisasi kepada bapak/ibu yang belum sertifikasi untuk pengambilan sertifikasi guru tersebut?
- 4) Bagaimana proses pelaksanaan sertifikasi guru di sekolah ini?

4. Kesamaan

- 1) Menurut bapak/ibu, bagaimana kinerja guru sebelum menerima sertifikasi?
- 2) Apakah ada perbedaan perlakuan guru sertifikasi dengan guru belum sertifikasi dalam hak sebagai guru?
- 3) Bagaimana kinerja guru yang telah mengikuti sertifikasi guru? apakah ada perbedaan?

5. Responsivitas

- 1) Bagaimana responsivitas Guru calon dan penerima sertifikasi guru atas proses pengambilan sertifikasi guru?
- 2) Bagaimana kinerja guru dalam menjalankan program pendidikan setelah menerima Sertifikasi guru?
- 3) Bagaimana respon bapak/ibu dengan adanya kebijakan sertifikasi guru?

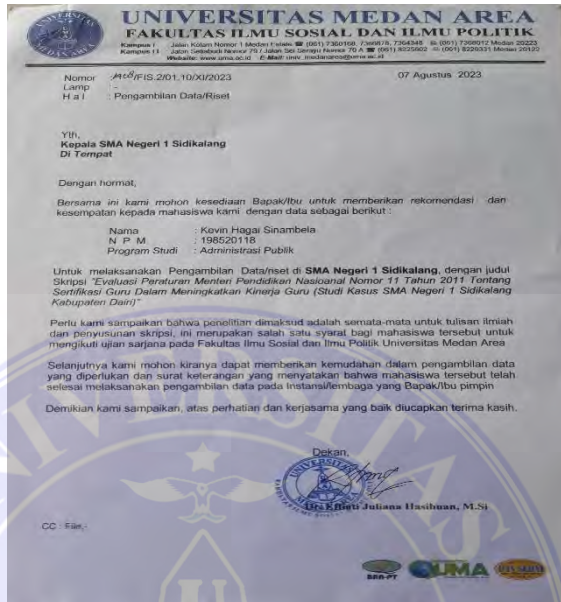
6. Ketepatan

- 1) Bagaimana kinerja guru sertifikasi disekolah ini menurut penilaian bapak/ibu?
- 2) Mutu apa saja yang telah bapak/ibu berikan setelah menerima sertifikasi guru?
- 3) Apakah pelaksanaan sertifikasi guru sudah tepat sesuai dengan peraturan menteri pendidikan nasional tahun 2011 tentang sertifikasi guru dalam meningkatkan kinerja guru?



B. SURAT IZIN PENELITIAN

1. Surat izin penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.



2. Surat keterangan melaksanakan penelitian dari SMA Negeri 1 Sidikalang Kabupaten Dairi.



C. DOKUMENTASI PENELITIAN

1. Dokumentasi Lokasi Penelitian di SMA Negeri 1 Sidikalang Kabupaten Dairi.



2. Dokumentasi dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sidikalang Kabupaten Dairi, Bapak **Dr. Silas Sahat Sihombing**.



3. Dokumentasi dengan guru penerima sertifikasi guru di SMA Negeri 1 Sidikalang, Bapak **Jonny Suhardo Siregar, S.Pd.**



4. Dokumentasi dengan guru penerima sertifikasi guru di SMA Negeri 1 Sidikalang, Ibu **Kardina Gultom, S.Pd.**



5. Dokumentasi dengan guru honorer yang belum menerima sertifikasi guru di SMA Negeri 1 Sidikalang, Bapak **Prima Capah, S.Pd.**



6. Dokumentasi dengan guru honorer yang belum menerima sertifikasi guru di SMA Negeri 1 Sidikalang, Ibu **Dina Samosir, S.Pd.**

